



PONDOK PESANTREN MODERN: POLITIK PENDIDIKAN ISLAM DAN PROBLEMATIKA IDENTITAS MUSLIM

Ihsan Harun

STAIN Gajah Putih Takengon, Aceh Tengah, Aceh

Email: win_mesir@yahoo.com

Abstrak. Tulisan ini bertujuan untuk mengurai politik pendidikan Islam dan problematika identitas Muslim pada pondok pesantren modern. Filsafat yang diyakini pada pondok pesantren adalah berdasarkan agama Islam, dan selanjutnya melandaskan filsafat pendidikan atas prinsip-prinsip filsafat yang dianutnya. Kalau pada mulanya tujuan utama pesantren adalah menyiapkan santri dalam mendalami dan menguasai ilmu pengetahuan agama (*tafaqquhu fi al-din*), lembaga pengkaderan ulama (*reproduction of ulama*) tempat pengajaran ilmu agama (*transfer of Islamic knowledge*), memelihara tradisi islam (*maintenance of Islamic tradition*). Pembentukan karakter (*character building*) yang islami. Dilain pihak pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga lembaga keagamaan dan lembaga sosial yang tentunya peran pesantren pun melebar menjadi agen pembaharuan. Dalam pandangan Islam politik pendidikan nasional seyogyanya memiliki dimensi. Untuk mengatasi problem identitas muslim dimensi tersebut diatas sangat mempengaruhi identitas muslim karena secara substantif, Islam di mana pun sama, yaitu agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw sebagai petunjuk bagi umat manusia. Akan tetapi manakala Islam berjumpa dengan budaya atau tradisi lokal di daerah mana pun senantiasa memunculkan ekspresi yang berbeda dan beranekaragam, sebanyak perjumpaannya itu. Dengan demikian, munculnya berbagai identitas Islam belakangan ini tidak perlu direspons dengan kecurigaan-kecurigaan yang berlebihan. Bahkan identitas Islam itu bisa makin beragam lagi ketika tipologi pemikiran, pemahaman dan pengamalan Islam itu ditinjau dari berbagai perspektif.

Kata kunci: pondok pesantren, pendidikan Islam, identitas Muslim.

Pendahuluan

Melihat perkembangan dunia pendidikan nasional yang sekarang ini, sungguh jika tidak diperkuat dengan kaidah keagamaan dan moral yang kuat, serta dibentengi dengan keimanan yang tangguh, kita tidak tahu akan seperti apa dunia pendidikan Indonesia dimasa yang akan datang. Keberadaan organisasi Islam dengan berbagai corak dan bentuk ajarannya serta lahirnya beberapa partai politik Islam yang menganut asas agama tidak memawa dampak signifikan terhadap Islam, di lain pihak isu sara, radikalisme, narkoba, sosmed dan korupsi menjadi tantangan bagi umat islam itu sendiri. Berangkat dari kondisi tersebut di atas eksistensi pondok pesantren merupakan salah satu tonggak yang sebenarnya sangat baik untuk meredam era globalisasi yang kadan jika tidak diimbangi dengan kekuatan moral dan spiritual akan membawa akibat yang tidak baik.

Filsafat yang dianut dan diyakini pada pondok pesantren adalah berdasarkan agama Islam, maka sebagai konsekwensinya logik, pondok pesantren berusaha dan selanjutnya melandaskan filsafat pendidikan atas prinsip-prinsip filsafat yang dianutnya. Kalau pada mulanya tujuan utama pesantren adalah menyiapkan santri dalam mendalami dan menguasai ilmu pengetahuan agama (*tafaqquhu fi al-din*), lembaga pengkaderan ulama (*reproduction of ulama*) tempat pengajaran ilmu agama (*transfer of Islamic knowledge*), memelihara tradisi islam (*maintenance of Islamic tradition*). Pembentukan karakter (*character building*) yang islami. Dilain pihak pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga lembaga keagamaan dan lembaga sosial yang tentunya peran

pesantren pun melebar menjadi agen pembaharuan dan pembangunan masyarakat (*agent of social change*). Tulisan ini akan mencoba mengurai tentang pondok pesantren modern: politik pendidikan islam dan problematika identitas muslim.

Pembahasan

1. Pondok Pesantren Modern

Secara etimologis, pondok pesantren adalah gabungan dari pondok dan pesantren. Pondok berasal dari bahasa arab *funduk* yang berarti hotel, yang dalam pesantren Indonesia lebih disamakan dengan lingkungan pedepokan yang dipetak-petak dalam bentuk kamar sebagai asrama bagi para santri. Sedangkan pesantren berasal dari kata dasar 'santri' yang mendapat awalan *pe* dan akhiran *an* yang berarti menunjukkan makna tempat (Nurcholish, 2007 : 61) Dengan demikian maka, Pesantren adalah tempat santri. Disisi lain ada sejumlah teori yang menjelaskan asal-usul kata santri. **Pertama**, berasal dari kata satri, bahasa sanskerta yang artinya melek huruf. **Kedua**, berasal dari *cantrik*, yang berarti seseorang yang selalu mengikuti guru ke mana guru pergi menetap. **Ketiga**, berasal dari bahasa India yang bermakna orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu atau ilmu pengetahuan (Zamakhsyari Dhofier, 1984:18.)

Menelaah lebih jauh dari makna diatas, membicarakan Pondok Pesantren Modern, seyogyanya jangan terjebak dalam konflik yang tidak berpenghabisan manakala tidak ada kesamaan persepsi tentang ontologi pesantren tersebut. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan dan pusat penyiaran Islam tertua yang lahir dan berkembang seiring dengan masuknya Islam di Indonesia. Pada awal berdirinya pondok pesantren umumnya sangat sederhana. Kegiatan pembelajaran biasanya diselenggarakan di langgar (*mushalla*) atau masjid oleh seorang kiai dengan beberapa orang santri yang datang mengaji. Lama kelamaan pengajian ini berkembang seiring dengan bertambahnya jumlah santri dan pelebaran tempat belajar sampai menjadi sebuah lembaga yang unik yang disebut pesantren. Sistem yang lazim dipergunakan dalam proses belajar mengajar di pesantren adalah wetonanatau bandongan sorogan (Haidar Putra Daulay. 2007 : 69). Disisi pada tataran epistemologi, sebagian besar teori yang menjelaskan epistemologi pesantren selalu bersifat *physical oriented*. Teori-teori tersebut umumnya menyebut integrasi 5 elemen pokok pesantren. Yaitu (1) Kiai (2) Santri (3) Masjid (4) Pondok dan (5) Pengajaran kitab-kitab Islam klasik (Marwan, 1980:9). Selain integrasi tersebut dari sekian banyak pesantren dapat dipolakan kedalam dua hal, pertama berdasarkan bangunan fisik, kedua berdasarkan kurikulum (Haidar Putra Daulay, 2007:66). Padahal, secara faktual, sesungguhnya kehidupan pesantren memiliki keragaman dan dinamika yang sangat variatif sejalan dengan setting sosial budaya masyarakat tempat pesantren berada. Di sebagian besar tempat, bisa jadi kelima unsur pesantren itu terpenuhi, namun di sebagian daerah bisa jadi salah-satu atau dua unsur tersebut tidak terpenuhi.

Jika menelusuri kondisi pesantren dengan sekian banyak dan kompleks varian dan dinamikannya, baik secara fisik, kultur, pendidikan, maupun kelembagaannya, maka pesantren sesungguhnya tidaklah sesederhana seperti yang teridentifikasi dengan adanya kiyai, santri, maupun masjid. Kalau pada mulanya tujuan utama pesantren adalah menyiapkan santri dalam mendalami dan menguasai ilmu pengetahuan agama (*tafaqquhu fi al-din*). Bahkan sejak dulu pesantren dikenal sebagai lembaga pengkaderan ulama (*reproduction of ulama*) tempat pengajaran ilmu agama (*transfer of Islamic knowledge*), memelihara tradisi islam (*maintenance of Islamic tradition*) (Husni Rahim, 2001 : 158). Namun disisi lain Pesantren sesungguhnya adalah suatu lembaga atau institusi pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang memiliki tingkat moralitas

keagamaan Islam dan sosial yang tinggi yang diaktualisasikan dalam sistem pendidikan dan pengajarannya. Dengan demikian, maka orientasi gerak dan pengajaran ilmu-ilmu agama, sosial maupun eksak di pesantren adalah tidak lebih dari sebuah proses pembentukan karakter (*character building*) yang islami.

Terlebih lagi akselerasi perubahan dan dinamika kehidupan sosial di era global sekarang ini terjadi secara luar biasa dan di luar perkiraan banyak orang. Yang menjadi sebuah ironi adalah perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh kemajuan spektakuler di bidang teknologi kecerdasan buatan (*intellelgencia artificial*) itu ternyata juga berakibat pada perubahan tata nilai keagamaan dan sosial. Maka kini pesantren bukan saja sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga lembaga keagamaan dan lembaga sosial. Peran pesantren pun melebar menjadi agen pembaharuan dan pembangunan masyarakat (*agent of social change*) (Husni Rahim, 2001 : 158).

2. Politik Pendidikan Islam

Politik pendidikan adalah suatu kajian antar disiplin (*interdisciplinary studi*) yang mengintegrasikan ilmu politik dan ilmu pendidikan, untuk melihat hubungan dinamis antara berbagai persoalan politik dan persoalan pendidikan (M. Sirozi, 2013 : 1). Dalam kontek pendidikan Islam kajian ini ingin menilik dan menemukan persoalan-persoalan politik dan pendidikan islam, dalam hal ini pendidikan pondok pesantren modern.

Tujuan utama kajian politik pendidikan adalah untuk menjelaskan hubungan atau relasi antara proses perumusan tujuan (*the production of goalds*) dan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapainya (*the form of their achievements*). Dalam membahas rumusan tujuan pendidikan Islam, misalnya jika studi administrasi pendidikan hanya membahas substansi dan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya, studi politik pendidikan juga membahas darimana rumusan tujuan tersebut muncul, siapa yang terlibat dalam penyusunannya, melauai apa mekanisme bagaimana rumusan tujuan tersebut dibahas dan ditetapkan nilai-nilai apa saja yang terdapat di dalamnya, dan kepentingan politik atau pendidikan siapa yang dipresentasikan di dalamnya (M. Sirozi, 2013 : 1-2).

Berangkat dari makna dan tujuan politik pendidikan, maka kajian politik pendidikan termasuk pendidikan Islam, seyogyanya berangkat dari periodisasi kesejarahan perjalanan bangsa. Hal ini dikarenakan politik pendidikan dipandang sebagai kepentingan lokal dan penciptaan identitas kebudayaan negara. Indonesia mengalami beberapa fase kesejarahan bangsa; *Pertama*, Pra-kemerdekaan (kolonialisme/penjajahan). Pada era ini, diungkapkan oleh Tilaar, fungsi lembaga pendidikan adalah gerakan perlawanan terhadap kolonialisme (HAR. Tilaar, 2001 : 34) Kala itu, kelompok pemuda terdidik di lembaga pendidikan, berkumpul dan menyusun strategi untuk membebaskan diri dari kungkungan penjajahan. Dalam konteks pendidikan Islam pun sama, Pondok Pesantren, sebagai sistem pendidikan Islam tertua di Indonesia, berkontribusi untuk menyahuti semangat perlawanan terhadap penjajah (Abdurrahman Mas'ud, 2013:3-5). *Kedua*, Fase kemerdekaan atau sering disebut Orde Lama. Pada masa kemerdekaan, posisi pendidikan ada dipersimpangan walaupun Indonesia sudah merdeka, dimasa ini pemerintah belum menentukan sistem pemerintahan yang akan dianut, sistem nagara Islam dan demokrasi menjadi isu hangat serta menjadi perdebatan yang berakhir pada kompromi yang dilakukan. Indonesia menyebut dirinya sebagai negara Pancasila yang mengakomodasi kepentingan kelompok nasionalis, dan religius. Dalam kontek dunia pendidikan pun sama, pendidikan Agama atau keagamaan diakomodasi melalui Kementerian Agama, dan adapun sistem pendidikan nasional dikelola oleh Kementerian Pendidikan.

Ketiga, Masa pembangunan atau Orde Baru. Di masa ini, politik pendidikan masih menganut sistem akomodatif terhadap dua model pendidikan yang dicetuskan oleh pemerintah Orde Lama. Namun, kedigdayaan peranan pemerintah, kala itu, cenderung lebih mengutamakan pendidikan umum. Artinya, pendidikan agama di masa orde baru, tidak banyak mendapat perhatian pemerintah. Eksistensi pendidikan Islam lebih mandiri dibandingkan sekolah yang disokong penuh pemerintah. Hal ini disebabkan mayoritas lembaga pendidikan Islam-seperti pesantren dan madrasah-lebih banyak dikelola oleh swasta atau swadaya masyarakat. Disisi lain hal yang disayangkan juga, para politisi muslim yang duduk diparlemen juga tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan lembaga pendidikan Islam (Tilaar:4). M.Sirozi mengatakan bahwa peranan para politisi muslim diamputasi oleh kekuatan kelompok nasionalis di Orde Baru. Politisi muslim di parlemen hanya mengisi kelompok minoritas (M. Sirozi, 2010:34). *Keempat*, pergolakan politik nasional lebih menekankan pada aspek demokrasi liberal. Sebuah model demokrasi yang mengedepankan pada kebebasan tanpa batasan. Semua orang bisa berekspresi, berpendapat, bertindak, dan bersekutu. Pada era ini, pemerintah kehilangan taringnya dalam mengakomodasi kepentingan-kepentingan tertentu. Pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator dan mediator terhadap kebutuhan masyarakat, Lahirnya Undang-Undang Sisdiknas ini mewajibkan pemerintah untuk mengatur dan mengelola lembaga pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dari sisi analisa teoritik, keberadaan pendidikan agama dan keagamaan, yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Sisdiknas sebenarnya sudah ada sebelum adanya PP. Nomor 55. Pondok Pesantren, misalnya, adalah dialektika kesejarahan kebudayaan Indonesia atau nusantara dengan Islam. Pesantren sudah ada dan berkembang sebelum Indonesia menjadi negara. Keberadaan peraturan ini memberikan dua dampak kecurigaan motif politik dalam konteks pendidikan Islam-khususnya Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah. *Pertama*, pondok pesantren tidak akan lagi memiliki kebebasan dalam upaya mengatur dan mengelola kurikulum yang akan diberikan kepada peserta didiknya. *Kedua*, adanya peraturan ini, secara implementatif akan dijadikan alat politik kepala daerah dalam upaya meraup suara di daerah.

Sementara Dalam pandangan Islam politik pendidikan nasional seyogyanya memiliki dimensi:

1) Membangun Iman

Tujuan Pendidikan menurut pandangan Islam ialah membangun iman manusia, dalam arti kata membangun suatu kepercayaan dan atau keyakinan manusia atas keberadaan dan kebesaran Allah dan Rasulnya, hal ini sebagaimana dijelaskan Allah dalam Q.S Al-Hujarat:15.

2) Meningkatkan ketakwaan

Tujuan pendidikan menurut pandangan Islam ialah meningkatkan takwa kepada Allah SWT. Hal ini sebagaimana ditegaskan Allah dalam Q.S. Ali Imran : 102 dan Q.S. Al-Hujarat:13.

3) Berakhlak mulia

Tujuan pendidikan menurut pandangan Islam adalah untuk menjadikan seseorang supaya mempunyai akhlak yang mulia (*akhlakul karimah*) atau budi pekerti yang luhur.

4) Menguasai ilmu

Tujuan pendidikan menurut pandangan Islam adalah mengarahkan manusia untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang setinggi-tingginya. Dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu ia sanggup menolong orang lain. Allah menegaskan hal ini dalam Q.S. Al-Mujadilah : 11.

5) Beramal Shaleh.

Tujuan pendidikan menurut pandangan Islam adaah mendorong manusia untuk beramal shaleh atau berbuat kebaikan. Allah menegaskan hal ini dalam Q.S. Al-Ashr : 2-3 dan Q.S.An-Nahl : 128 (Ali Muhdi Amnur : 2007 : 9-10).

3. Problematika Identitas Muslim

Problematika yang dihadapi umat muslim dewasa ini meliputi seluruh dimensi kehidupan seperti sara, radikalisme, narkoba, sosmed dan korupsi. Persoalan-persoalan inilah yang mengakibatkan umat mengalami stagnasi dalam segala bidang dan akhirnya sangat mudah umat Islam terjebak dalam jaringan atau konspirasi.

Berdasarkan sejumlah pengamat dunia, memang pernah mengapresiasi tentang watak atau karakteristik Islam Indonesia yang dikenal dengan Islam yang damai, ramah dan toleran yang mencirikan Islam yang diharapkan untuk masa depan. Problematika pendidikan Islam dalam hal ini pondok pesantren saat ini jauh berbeda dengan tantangan pendidikan Islam sebagaimana yang terdapat pada zaman klasik dan pertengahan. Baik secara internal maupun eksternal

Pendidikan sekarang lebih berorientasi kepada bagaimana meningkat kecerdasan, prestasi, keterampilan, dan bagaimana menghadapi persaingan serta berorientasi kepada angka raport atau indek Prestasi akademik. Pendidikan sekarang kehilangan misi utamanya untuk investasi karakter manusia. Pendidikan moral dan karakter bukan lagi merupakan faktor utama seorang anak mengenyam pendidikan. Kedua hal ini dianggap menjadi tugas para tokoh agama, tugas orang tua atau wali di rumah. Sekolah berlomba menonjolkan kurikulum yang dipercaya bisa menciptakan generasi muda super dari usia sedini mungkin. Jadi Pendidikan adalah kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan. Keadaannya selalu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan corak, sifat dan kebudayaan yang berkembang di masyarakat tersebut (Ali Khalil Abu al-Ainain, 1980 : 37).

Seiring perkembangan zaman, pendidikan yang hanya berbasiskan *hard skill* yaitu menghasilkan lulusan yang hanya memiliki prestasi dalam akademis, harus mulai dibenahi. Sekarang pembelajaran juga harus berbasis pada pengembangan *soft skill* (interaksi sosial) sebab ini sangat penting dalam pembentukan karakter anak bangsa sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan santun dan berinteraksi dengan masyarakat. Pendidikan *soft skill* bertumpu pada pembinaan mentalitas agar peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan realitas kehidupan. Kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan keterampilan teknis (*hard skill*) saja, tetapi juga oleh keterampilan mengelola diri dan orang lain (*soft skill*).

Pondok pesantren yang mencetak para generasi muda Islam yang tidak hanya kuat dalam *'ilmu 'ilmiyah* tapi juga dalam *ilmu 'amaliyah*. Pondok Pesantren hendaknya berusaha mencetak para pemimpin masa depan yang mampu berjuang di bidang apapun yang menjadi pilihannya dengan bekal karakter mukmin yang kompeten kuat dan *life skill* yang telah terbentuk serta mampu berjuang dimana pun dengan segala kendalanya.

Adapun Kompetensi santri yang dihasilkan adalah merupakan integrasi dari pengetahuan (ilmu), nilai dan sikap (iman) dan perbuatan (amal) atau dalam definisi yang lebih operasional, kompetensi lulusan adalah penguasaan dan pemilikan ilmu pengetahuan (*knowledge*) yang dapat diterapkan dalam kehidupan (*skill*) dengan nilai-nilai akhlak mulia (*attitude*), sehingga diharapkan santri yang memiliki ilmu yang dapat diamalkan dengan sholeh. Sedangkan untuk pengembangan keilmuan, Pondok Pesantren telah memberikan “bekal” yang sangat cukup untuk lulusannya agar menjadi manusia yang berkompeten, diantaranya kemampuan berbahasa Arab dan Inggris yang aktif, karena bahasa adalah kunci dalam membuka wawasan, baik keilmuan maupun keterampilan.

Anak didik yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan Islam seperti Pondok Pesantren adalah bukan hanya anak yang mengetahui sesuatu secara benar (*to know*) melainkan juga harus disertai dengan mengamalkannya secara benar (*to do*), mempengaruhi dirinya (*to be*) dan membangun kebersamaan hidup dengan orang lain (*to life together*). Pendidikan Islam harus menghasilkan manusia yang memiliki ciri-ciri: 1) terbuka dan bersedia menerima hal-hal baru hasil inovasi dan perubahan; 2) berorientasi demokratis dan mampu memiliki pendapat yang tidak selalu sama dengan pendapat orang lain; 3) berpijak pada kenyataan, menghargai waktu, konsisten dan sistematis dalam menyelesaikan masalah; 4) selalu terlibat dalam perencanaan dan pengorganisasian; 5) memiliki keyakinan bahwa segalanya dapat diperhitungkan; 6) menyadari dan menghargai pendapat orang lain;) rasional dan percaya pada kemampuan iptek; 8) menjunjung tinggi keadilan berdasarkan prestasi, kontribusi, dan kebutuhan; dan 9) berorientasi kepada produktivitas, efektifitas dan efisiensi. Manusia yang memiliki ciri-ciri seperti itulah yang harus dihasilkan oleh pendidikan Islam, yaitu manusia yang penuh percaya diri (*self confident*) serta mampu melakukan pilihan-pilihan secara arif serta bersaing dalam era globalisasi yang kompetitif (Mastuhu, 2009 : 47), sehingga Pondok Pesantren dapat mempersiapkan generasi Islam untuk menjadi orang ‘*alim* dan *faqih* di setiap aspek kehidupan, baik ilmu *diniyah* (Ijtihad, Fiqh, Peradilan, dll) maupun ilmu terapan dari sains dan teknologi (kimia, fisika, kedokteran, dll). Sehingga *output* yang didapatkan mampu menjawab setiap perubahan dan tantangan zaman dan problematika identitas Muslim.

Menghadapi era globalisasi yang berdampak kepada berbagai perubahan baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya, diperlukan pengkajian bagaimana Pondok Pesantren mengapresiasi gejala modernisasi yang berlangsung demikian kuatnya seperti sekarang ini. dengan bekal ilmu yang berimbang baik *diniyah* maupun *madiyah*-nya. karena itu semua kelompok masyarakat termasuk masyarakat Pondok Pesantren harus siap menghadapinya dan perlu menanggapi problematika identitas muslim terbuka dan kritis.

Kesimpulan

Pondok pesantren dengan sekian banyak dan kompleks varian dan dinamikannya, baik secara fisik, kultur, pendidikan, maupun kelembagaannya, tujuan utama pesantren adalah menyiapkan santri dalam mendalami dan menguasai ilmu pengetahuan agama (*tafaqqahu fi al-din*). lembaga pengkaderan ulama (*reproduction of ulama*) tempat pengajaran ilmu agama (*transfer of Islamic knowledge*), memelihara tradisi islam (*maintenance of Islamic tradition*). Namun disisi lain Pesantren sesungguhnya adalah suatu lembaga atau institusi pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter (*character building*) yang islami yang memiliki tingkat moralitas keagamaan Islam dan

sosial yang tinggi yang diaktualisasikan dalam sistem pendidikan dan pengajarannya. Karenanya dalam pandangan Islam politik pendidikan nasional seyogyanya memiliki dimensi: Membangun Iman, meningkatkan ketakwaan, berakhlak mulia, menguasai ilmu, beramal shaleh.

Untuk mengatasi problem identitas muslim dimensi tersebut diatas sangat mempengaruhi identitas muslim karena secara substantif, Islam di mana pun sama, yaitu agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw sebagai petunjuk bagi umat manusia. Akan tetapi manakala Islam berjumpa dengan budaya atau tradisi lokal di daerah mana pun senantiasa memunculkan ekspresi yang berbeda dan beranekaragam, sebanyak perjumpaannya itu. Dengan demikian, munculnya berbagai identitas Islam belakangan ini tidak perlu direspons dengan kecurigaan-kecurigaan yang berlebihan. Bahkan identitas Islam itu bisa makin beragam lagi ketika tipologi pemikiran, pemahaman dan pengamalan Islam itu ditinjau dari berbagai perspektif.

Daftar Pustaka

- Amnur Ali Muhdi, *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional* (Yogyakarta : Pustaka Fahima, 2007), h. 9-10.
- Ali Khalil Abu al-Ainain, *Falsafah al-Tarbiyah al - Islamiyah, fi al-Quran al – Karim*, (t.t : Dar a;-Fikr al-Araby, 1980),h.37
- Ali Mohammad, *Islam Muda Liberal, Post Puritan, Post Tradisional* (Yogyakarta: Apeiron Philates, 2006), h. 10.
- Dhofier, Zamakhsyari *Tradisi Pesantren* (Jakarta : LP3ES, 1984), h. 18
- Daulay Haidar Putra. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media Group Cet.1, 2007) h. 66
- Fanani Ahmad Fuad, *Islam Mazhab Kritis Menggagas Keberagamaan Liberatif* (Jakarta: Kompas, 2004), h. 116.
- Imdadun M., *Islam Pribumi Mendialogkan Agama Membaca Realitas* (Jakarta: Erlangga, 2003), h. xx-xxi.
- Madjid Nurcholish , *Bilik-bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta : Paramadina, 1997),h.10 lihat juga Haidar Putra Daulay. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media Group Cet.1, 2007) h. 61
- Mas'ud Abdurrahman, *Politics of The Nation and Madrasah''s Policy, Paper The Second International Symposium Empowering Madrasah In The Global Context*; Jakarta 3-5 September 2013.
- Muhammad Husein, “*Hukum Islam yang Tetap dan yang Berubah*”, dalam Akhmad Sahal (eds.), *Islam Nusantara dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan* (Bandung: Mizan, 2015), h. 98.
- Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, (Jakarta, 2009),h.47.
- Rahim Husni , *Arah Baru pendidikan islam di Indonesia* (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 2001),h. 158.

- Saridjo, Marwan, dkk, *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia* (Jakarta : Dharma Bakti, 1980), h. 9.
- Sirozi, M. *Konteks dan Kerangka Konseptual kajian politik Pendidikan* (Palembang : Neor Fikri. 2013), h. 1.
- Sirozi, M. *Peran Politik Islam di Masa Orde Baru; Studi Terhadap Perumusan Sistem Pendidikan Nasional 1989* (Jakarta ; Rajagrafindo Persada, 2010), 34
- Sobarna Ayi, *Islam Positif Spirit Wacana Solusi Refleksi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. v.
- Tilaar HAR., *Pendidikan dan Kebudayaan* (Bandung: Rinneka Cipta, 2001), 34.